



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 dan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2024
BUPATI BANTUL, 



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR

THE STATE
DEPARTMENT OF HEALTH
DIVISION OF PUBLIC HEALTH
BUREAU OF VITAL STATISTICS
BOSTON, MASSACHUSETTS

STATE OF MASSACHUSETTS, DEPARTMENT OF HEALTH, DIVISION OF PUBLIC HEALTH, BUREAU OF VITAL STATISTICS

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

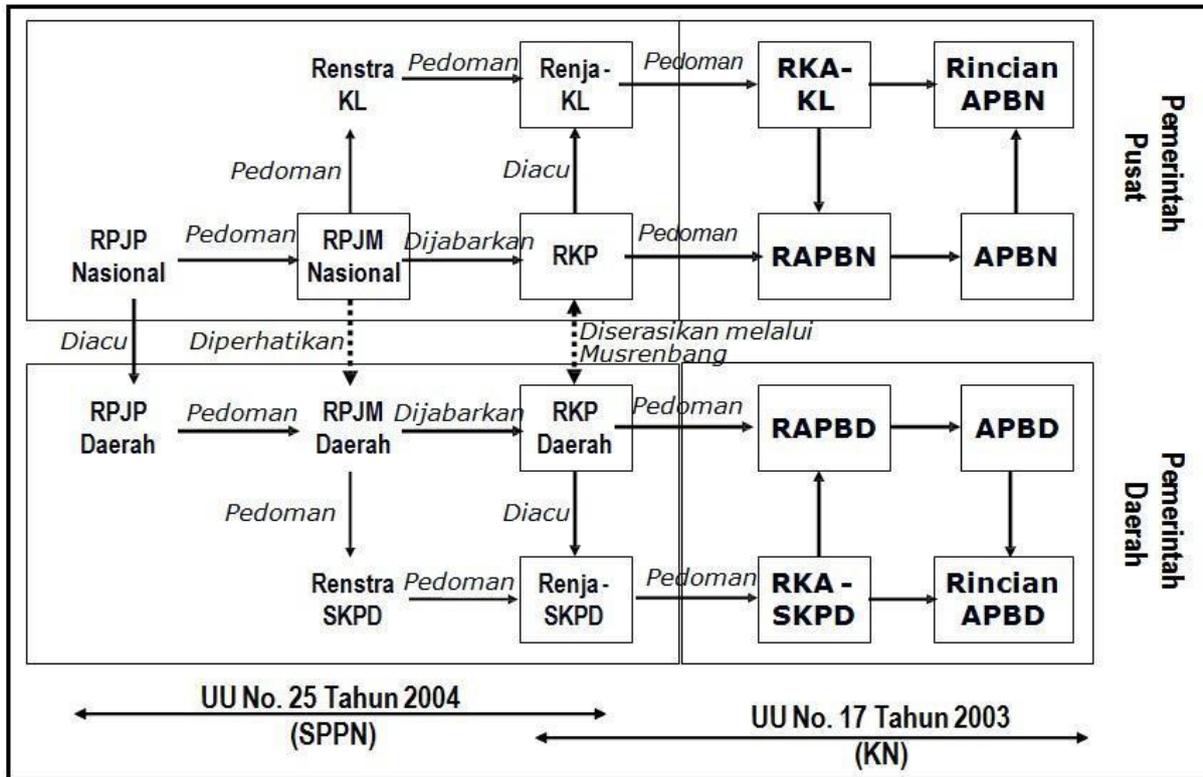
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Pajangan. Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2025 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 34).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023,
2. Evaluasi Tahun 2023 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2022 dan perkiraan realisasi Tahun 2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2023. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	80	79.53	80	81.69	102.11	81	81	101.25
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.01,0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	6	9	-	-	-	-	9	150
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	-	5	5	100	7	12	43
7.01.01.2.01,0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	7	11	-	-	-	-	11	157
		Dokumen Keuangan	65	65	-	-	-	-	65	100
7.01.01.2.01,0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	-	5	5	100	5	10	50
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100	100	80	100	125	100	100	100
7.01.01.2.02,0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	14	28	-	-	-	-	28	200
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1400	-	16	16	100	20	36	3

7.01.01.2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan dan barang, dan kepegawaian	120	228	-	-	-	-	228	190
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	-	12	12	100	12	24	50
7.01.01.2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	88	-	22	22	100	22	44	50
7.01.01.02.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	80	100	125	100	100	100
7.01.01.02.5.0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	-	4	4	100	4	8	67
7.01.01.02.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	80	79.53	80	100	125	100	100	125
7.01.01.2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	13	30	-	-	-	-	30	231
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	-	4	4	100	4	8	50
7.011.01.2.06.	Penyediaan Peralatan	ATK	18	19	-	-	-	-	19	106

02	dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	-	4	4	100	4	8	200
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan, peralatan kebersihan dan alat perlengkapan rumah tangga	29	44	-	-	-	-	44	152
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	-	4	4	100	4	8	50
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	4	7	-	-	-	-	7	175
		Penggandaan	3.538	21.952	-	-	-	-	21.952	620
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	-	4	4	100	4	8	50
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan perundang-undngn	1	13	-	-	-	-	13	1.300
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	-	12	12	100	12	24	50
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan rapat-rapat	40	108	-	-	-	-	108	270
		perjalanan dinas dalam daerah	280	274	-	-	-	-	274	98
		perjalanan dinas luar daerah	5	4	-	-	-	-	4	80
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650	-	124	124	100	50	174	27

7.01.01.2.06.1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan penataan arsip	2	2	-	-	-	-	2	100
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	-	1	1	100	1	2	100
7.01.01.2.06.1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	-	1	1	100	1	2	50
7.01.01.02.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100							
7.01.01.2.07.0 5	Pengadaan Mebel	pengadaan mebel	2	2	-	-	-	-	2	100
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	-	3	3	100	2	5	63
7.01.01.2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin	5	5	-	-	-	-	5	100
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	-	5	5	100	5	10	50
7.01.01.02.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100							
7.01.01.2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	300	200	-	-	-	-	200	67
7.01.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber	pembayaran rekening listrik dan telephon	12	12					12	100

7.01.01.2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	pemeliharaan kendaraan dinas	6	7	-	-	-	-	7	117
7.01.01.2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32	-	8	8	100	8	16	50
7.01.01.2.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	3	3	-	-	-	-	3	100
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	12	-	3	3	100	3	6	50
07.01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	92	94.88	90	100	111.11	90	90	97.83
07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	92	90	90	100	111.11	100	100	108.70

07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan koordinasi forkompinkap	4	7	-	-	-	-	7	175
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16	-	4	4	100	4	8	50
07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan intensifikasi PAD	1	1	-	-	-	-	1	100
		laporan pembinaan pemerintahan Kalurahan	1	4	-	-	-	-	4	400
		monografi kapanewon	2	1	-	-	-	-	1	50
		pendampingan pengelolaan keuangan Kalurahan	1	3	-	-	-	-	3	300
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29	-	7	7	100	11	18	62
07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	100	90	90	100	111.11	100	100	100
07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	laporan survey kepuasan masyarakat	2	21	-	-	-	-	21	1050
		masyarakat yang dilayani	5,050	5,520	-	-	-	-	5520	109
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	8	-	2	2	100	2	4	50

07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	100	100	100	100	100	90	90	90
07.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	100							
07.01.03.2.01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2	3	-	-	-	-	3	150
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40	-	8	8	100	10	18	45
07.01.03.2.01. 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan bidang sosial	35	29	-	-	-	-	29	83
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	-	24	24	100	25	49	102
07.01.03.02.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	88	100	88	100	100	100	100	113.64
07.01.03.2.03. 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	11	7	-	-	-	-	7	64
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	-	4	4	100	5	9	75

07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	100	100	100	100	90	90	90
07.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100							
07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan penanggulangan bencana	2	4	-	-	-	-	4	200
		laporan kejadian trantibum Kapanewon	2	6	-	-	-	-	6	300
		laporan pemberdayaan linmas/FPRB	0	1	-	-	-	-	1	100
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20	-	12	12	100	5	17	85
07.01.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100							
07.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	90	100	100

07.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	laporan pelaksanaan upacara hari besar	12	17	-	-	-	-	17	142
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12,000	-	70	70	100	50	120	1

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak ada kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	NIHIL	NIHIL

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
(1)	(2)	(3)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kerjasama yang baik antar stakeholder (Pelaku Seni dan budaya, UMKM, Pelaku pariwisata, Kalurahan, Kapanewon, Forkompinkap)
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kerjasama yang baik antar stakeholder (Pelaku Seni dan budaya, UMKM, Pelaku pariwisata, Kalurahan, Kapanewon, Forkompinkap)

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
(1)	(2)	(3)
	Gelar Budaya Jogja	<p>Kerjasama yang baik antar stakeholder (Pelaku Seni dan budaya, UMKM, Pelaku pariwisata, Kalurahan, Kapanedwon, Forkompinkap)</p> <p>Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhdap kegiatan tersebut.</p>
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kerjasama yang baik antara aparat kapanewon, kalurahan, dan OPD terkait
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kerjasama yang baik antara aparat kapanewon, kalurahan, dan OPD terkait
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	<p>Kerjasama yang baik antara aparat kapanewon, kalurahan, dan OPD terkait</p> <p>Pendampingan dari Bappeda, Bag. Organisasi, Bag. Tapem.</p> <p>Adanya regulasi peraturan yang menjadi acuan.</p>
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koordinasi dan Kerjasama yang baik antara ASN dan Non ASN kapanewon
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Kerjasama yang baik antara pejabat struktural di kapanewon
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<p>Penyusunan Perencanaan Kegiatan tepat waktu</p> <p>Partisipasi pelaksana kegiatan yang aktif dalam perencanaan</p> <p>Pendampingan dari Bappeda, Bag. Organisasi, Bag. Tapem.</p> <p>Adanya regulasi peraturan yang menjadi acuan.</p>
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kegiatan terdokumentasikan dalam Web. Kapanewon

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
(1)	(2)	(3)
		<p>Koordinasi dan kerjasama yang baik antar pejabat struktural Kapanewon</p> <p>Capaian Kinerja, Keuangan dan barang dievaluasi per triwulan;</p> <p>Capaian kinerja, keuangan dan barang tersistem dalam aplikasi;</p> <p>Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.</p>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan kerjasama yang baik antara pejabat struktural dan staf kapanewon
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Daftar penerimaan Gaji dan tunjangan sudah ada di aplikasi
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kerjasama yang baik antar anggota pengelola keuangan, barang, petugas urusan kepegawaian, dan pengelola website kapanewon.
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Keerjasa yang baik antara pelaksana teknis dan pengelola keuangan.
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koordinasi dan kerjasama yang baik seluruh karyawan/wati/pegawai kapanewon
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Koordinasi dan kerjasama yang baik seluruh karyawan/wati/pegawai kapanewon
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana dan prasarana kantor yang memadai
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Barang mudah didapatkan/diperoleh
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barang mudah didapatkan/diperoleh
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Barang mudah didapatkan/diperoleh
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jarak dekat dengan penyedia/pihak ketiga

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
(1)	(2)	(3)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Barang mudah didapatkan/diperoleh
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan kerjasama yang baik dari forkompinkap, kalurahan, lintas sektoral, dan stekaholder taerkait.
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Adanya sarana prasarana yang menunjang perngarsipan dokumen.
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan dan pendamping.
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya rekanan yang memenuhi kualifikasi
	Pengadaan Mebel	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan Barang mudah didapatkan/diperoleh
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan Barang mudah didapatkan/diperoleh
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan sesuai dengan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan sesuai dengan perencanaan Pembayaran lebih mudah dengan menggunakan CMS
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyedia jasa / pihak ketiga mudah didapat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perencanaan sesuai dengan kebutuhan Kerjasama yang antara kapanewon dan tenga Non ASN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dilaksanakan berdasarkan inventarisasi BMD yang harus diperbaiki dan kepedulian akan kelayakan BMD

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
(1)	(2)	(3)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<p>Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;</p> <p>Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan</p> <p>Kepedulian pengguna Kendaraan Dinas akan kelayakan kendaraan dinas yang dipakainya.</p>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<p>Tersedianya rekanan yang berpengalaman;</p> <p>Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;</p> <p>Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin.</p> <p>Inventarisasi gedung yang memerlukan perbaikan.</p>
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	kerjasama yang baik antar instansi di kapanewon
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kerjasama yang baik antar instansi di kapanewon
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa, kerjasama yang baik antar instansi di kapanewon
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa; kerjasama yang baik antar instansi di kapanewon
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kerjasama yang baik antar petugas di Kapanewon

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
(1)	(2)	(3)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	<p>Tersedianya SOP Pelayanan;</p> <p>Tersedianya anggaran pendukung kegiatan pelayanandan terencanaanya pelaksanaan kegiatan;;</p> <p>Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan;</p> <p>Tersedianya media komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan.</p>
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kerjasama yang baik antar stakeholder yang ada di kapanewon
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<p>kerjasama yang baik antar stakeholder yang ada di kapanewon</p> <p>Tersusunnya usulan pembangunan desa;</p> <p>Tersedianya anggaran dan terencanaanya pelaksanaan kegiatan Musrenbang;</p> <p>Komunikasi intensif dengan instansi pengampu usulan.</p> <p>Antusiasme kelompok pemberdayaan masyarakat;</p> <p>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p> <p>Koordinasi dan kerjasama yang baik antara lembaga kemasyarakatan, kapanewon, dinas/instansi se-kapanewon.</p>
	Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan Lembaga Tingkat	<p>kerjasama yang baik antar stakeholder yang ada di kapanewon (masyarakat, pelaku UMKM, kalurahan)</p> <p>Kerjasama yang baik dengan masyarakat, pelaku UMKM, Kalurahan</p>

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
(1)	(2)	(3)
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kerjasama yang baik antar Stakeholder di Kapanewon (sekolah, forkompinkap, kalurahan, OPD se-Kapanewon Pajangn)
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kerjasama yang baik antar instansi se-Kapanewon
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersedianya anggaran koordinasi pengendalian wilayah dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Kerjasama yang baik antar instansi se-Kapanewon, dan forkompinkap.
		Terjalinnnya komunikasi intensif pengampu trantibum.
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kerjasama yang baik antar Stakeholder di Kapanewon (sekolah, forkompinkap, kalurahan, OPD se-Kapanewon)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kerjasama yang baik antar Stakeholder di Kapanewon (sekolah, forkompinkap, kalurahan, OPD se-Kapanewon)
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar dan kerjasama yang baik antar Stakeholder di Kapanewon (sekolah, forkompinkap, kalurahan, OPD se-Kapanewon)

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2025 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan berbasis IT dan Kinerja;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, sebagai upaya menyusun sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan yang tepat dan akurat;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dan memberikan informasi PATEN melalui media cetak, elektronik dan social;
4. Meningkatkan koordinasi wilayah dan fasilitasi dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi local;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi hal ketentraman, ketertiban serta penanggulangan terhadap potensi kebencanaan;
6. Meningkatkan peran swasta, atau sumber dana lain yang dapat diakses dalam upaya peningkatan pembangunan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi;
7. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bersama seluruh Tim Kapanewon dalam upaya menciptakan masyarakat harmonis, dan sejahtera secara adil dan merata;
8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan vertical dalam memproyeksikan program dan kegiatan, sehingga bersinergi sampai dengan tingkat Kelurahan, terkait hasil yang dituju;
9. Meningkatkan fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di kalurahan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Pajangan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun

2021-2026. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pajangan
Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Target			Catatan Analisis
			Target	Realisasi	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	IKM Kapanewon	94,75	94,5	95,26	95	95,5	96	Secara prosentase, realisasi IKU sebesar 100,80% terhadap target, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dengan nilai Sangat Tinggi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Pajangan Tahun 2023 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Kapanewon Pajangan dapat memenuhi target .

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kapanewon Pajangan Tahun 2023 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2025 supaya IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya SOP Pelayanan Kapanewon
2. Tersedianya anggaran pendukung kegiatan pelayanan
3. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan

4. Tersedianya media informasi dan komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan dalam upaya evaluasi kinerja.
5. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan;
6. Prosedur pelayanan satu pintu;
7. Komitmen pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan;
8. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan forkopimkap, kalurahan, instansi dan stakeholder terkait.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Kapanewon Pajangan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Kekuatan		Kelemahan	
1.	SDM yang beragam;	1.	Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas SDM Kapanewon;
2.	Kompetensi dan Integritas rendah;	2.	Kinerja OPD turun;
3.	Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana;	3.	Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana;
4.	Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon;	4.	Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon relatif rendah;

Kekuatan		Kelemahan	
5.	Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul.	5.	Keselarasan komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon perlu dijaga.

Selain itu, selama Tahun 2023 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Peluang		Tantangan/Ancaman	
1.	Usulan penambahan dan diklat PNS;	1.	Masa pensiun dan keterbatasan pegawai; Pegawai meninggal dunia.
2.	Adanya dukungan perangkat dan jaringan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul;	2.	Pagu anggaran yang telah ditentukan dan belanja asset yang terbatas;
3.	Usulan penambahan anggaran, asset dan penghapusan;	3.	Terhambatnya pelayanan dan pembangunan masyarakat;
4.	Adanya unit OPD di kewilayahan Kapanewon;	4.	Fungsi fasilitasi dan koordinasi tidak optimal;
5.	Adanya Dana Desa/Kelurahan;	5.	Terhambatnya fungsi bimbingan dan pengawasan vertikal.
6.	Adanya perusahaan di wilayah Kapanewon (CSR);Program pembangunan dari dana aspirasi	6.	Pelanggaran aturan dan ketentuan; Masih terjadi gangguan kamtibmas
7.	Kebutuhan penegakan legalitas masyarakat dan kelurahan serta verifikasi pelayanan , maupun pengelolaan pemerintahan.	7.	Pendampingan dan fasilitasi dari kapanewon terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalurahan kurang intens, tidak terjadwal rutin.
8.	Kebutuhan masyarakat dan kelurahan terhadap Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah	8.	Akses permohonan pembangunan masyarakat bisa lewat berbagai akses, pembangunan dari PIK,Dais, Kalurahan, atau sumber lain harus dikoodinasikan/ diidentifikasi terlebih dulu, agar kegiatan yang dilaksanakan tidak sama atau tidak dalam lokasi/sasaran yang sama.

Peluang		Tantangan/Ancaman	
9.	Program pembangunan kewilayahan OPD	9.	Keterbatasan akses kewilayahan hanya pada fasilitasi dan koordinasi
10.	Akses kewilayahan horisontal dan vertikal	10.	Diperlukan promosi wisata dan pembangunan infrastruktur penunjang;
11.	Potensi beberapa obyek wisata Kapanewon (Obyek wisata alam, sejarah/religi, sentra kuliner)	11.	Terbengkalai obyek wisata, sehingga tidak mendatangkan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat
12.	Potensi produk-produk unggulan setempat, banyak terdapat pelaku UMKM (Makanan mentah, gula jawa, minuman, batik kayu, blankon, dll)	12.	Diperlukan bimbingan dan pemberdayaan inovasi yang dapat meningkatkan produksi dan nilai ekonomis produk;
13.	Pembangunan Taman Budaya, UIN, Ikon DIY Goa Slarong dan Bendung Kamijoro.	13.	Potensi obyek wisata kurang berkembang
		14.	Gesekan kepentingan antar masyarakat;
		15.	Potensi wisata sejenis yang banyak terdaat di daerah lain.
		16.	Konsep terintegrasi terhadap berbagai pembangunan wilayah baik, SDM maupun infrastruktur pendukung.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka strategi pada Tahun 2025 yang akan dilakukan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM serta kelembagaan berbasis IPTEK dan kinerja;
2. Meningkatkan fungsi sarana prasarana asset daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon;
3. Meningkatkan manfaat berbagai media dalam mendukung informasi publik dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

4. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam mengupayakan sinergitas pembangunan kewilayahan baik bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ketentraman ketertiban dan lingkungan hidup dalam bentuk peningkatan infrastruktur maupun SDM di Kapanewon;
5. Meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata alam serta produk unggulan asli daerah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat;

2..4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pajangan Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pajangan

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kap. Pajangan	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	0 Persen	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kap. Pajangan	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 Persen	100,000,000	
1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan		-	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	0	100,000,000	
1	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0 Dokumen	-	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100,000,000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN	Kap. Pajangan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Yang Berkualitas	100 persen	116,040,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN	Kap. Pajangan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Yang Berkualitas	100 persen	40,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KETATALAKSANAAN		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 Persen		DAN KETATALAKSANAAN		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	82 Persen		
2	Peningkatan Budaya Pemerintahan		Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	84 persen	50,000,000	Peningkatan Budaya Pemerintahan		Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan		0	
2	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	50,000,000	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota		0	
3	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan		Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	66,040,000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	40,000,000	
3	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan		Jumlah Program dan Kegiatan	2 Dokumen	66,040,000	Perencanaan dan Pengendalian		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang		0	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keistimewaan		Keistimewaan yang Disusun			Urusan Kelembagaan		Disusun			
4	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantran dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantran dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi			Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantran dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantran dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	40,000,000	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kap. Pajangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	3,283,003,362	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kap. Pajangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3,379,087,453	
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	82 persen	22,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	6,180,000	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	3,090,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	15,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3,090,000	
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100 persen	2,462,103,362	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100 persen	2,862,374,219	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2,407,103,362	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2,804,284,219	
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	50,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	53,090,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	22 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	22 Laporan	5,000,000	
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	3,360,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	3,400,000	
10	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	3,360,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	3,400,000	
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi	100 persen	281,340,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	147,152,089	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			umum								
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	26,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,526,860	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	37,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	18,909,749	
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	27,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,959,780	
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10,078,700	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	1,700,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2,400,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang Disediakan								
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	154,090,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	98,282,000	
17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	8,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	3,295,000	
18	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2,550,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1,700,000	
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100 persen	105,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	- persen	-	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Daerah					
19	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	35,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	-	
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	70,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	200,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	205,395,580	
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37,200,000	
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	4 Laporan	40,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	11,170,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kantor yang Disediakan								
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	123,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	157,025,580	Penyesuaian UMR Honor Non ASN
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	209,200,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	139,585,565	
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	125,200,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	133,802,700	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3 unit	84,000,000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 unit	5,782,865	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dipelihara/Dirchabilitasi								
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kap. Pajakan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	91 persen	150,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kap. Pajakan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	89 persen	26,420,000	
11	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	91 persen	105,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	89 persen	16,450,000	
26	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	45,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	7,100,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	60,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	9,350,000	
12	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian kinerja pelayanan Kapanewon	91 persen	45,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian kinerja pelayanan Kapanewon	89 persen	9,970,000	
28	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	45,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	9,970,000	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kap. Pajangan	Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat	91 persen	185,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kap. Pajangan	Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat	89 persen	110,762,500	
13	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	91 persen	115,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	89 persen	83,360,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	20,000,000	
30	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	65,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	63,360,000	
14	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Capaian kineja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	91 persen	70,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Capaian kineja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	89 persen	27,402,500	
31	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	70,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	27,402,500	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kap. Pajakan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	91 persen	120,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kap. Pajakan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	100 persen	168,531,000	
15	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	91 persen	120,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 persen	168,531,000	
32	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	120,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	168,531,000	Tambahan Kegiatan Paskibra
VI I	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Kap. Pajakan	Cakupan Stabilitas Penyelenggara	100 persen	145,498,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Kap. Pajakan	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	100 persen	5,825,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PEMERINTAHAN UMUM		aan Pemerintahan Umum			PEMERINTAHAN UMUM		Umum			
16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	91 persen	145,498,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	5,825,000	
33	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	3.000 Orang	145,498,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	5,825,000	Kegiatan HUT RI dialihkan ke Sub Kegiatan yang lain

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Negara Kesatuan Republik Indonesia					
	JUMLAH				3,999,54 1,362					3,815,62 5,953	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Kapanwon Pajangan Tahun 2025, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2025 serta tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2025 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
- PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
- PN 5: Melanjtkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 dan prioritas nasional tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Pajangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan kalurahan berdasarkan potensinya;
2. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan yang terpadu;
3. Meningkatkan kelembagaan dan sarana prasarana berbasis IT penunjang kinerja Kapanewon Pajangan;
4. Meningkatkan kinerja pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
5. Meningkatkan fasilitasi dan koordiniasi secara intensif, penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2025 dalam Rancangan Awal RKPd Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah" dengan Prioritas Daerah sebagai berikut :

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan;
2. Pemerataan kualitas infrastruktur;
3. Peningkatan SDM berdaya saing;
4. Pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana;
5. Pemantapan layanan publik berbasis informasi teknologi;
6. Pengembangan kawasan pansela dan kawasdan industri Piyungan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
				Tahun 2022	Tahun 2023		
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon	IKM Kapanewon	94,75	95,26	95	95,5

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Pajangan Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Pajangan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pajangan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Restorasi OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapanewon Pajangan					3.815.625.953,00							4.562.025.362,00	
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					100.000.000,00							175.000.000,00	
	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					100.000.000,00							175.000.000,00	

1	2	2	0		PROGRAM PENYELE NGGARA AN KEISTIME WAAN YOGYAK ARTA URUSAN KEBUDA YAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	-			100 %	100.00 0.000,0 0						-	175.00 0.000,0 0	
	2	2	0	5.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	-			100 %	100.00 0.000,0 0			Memp erkuat Refor masi Politik, Hukum , dan Birokr asi, serta Memp erkuat Pence gahan dan Pembe rantasan Korups i, Narko	Peng uatan good- gover nanc e pada berb agai tingk atan Pema ntapa n Layan an P[ubli c Berb asis Tekn	Masy araka t, pelak u seni buda ya, UMK M	-	175.00 0.000,0 0	

									5 Laporan	3.090.0 00,00	Kab. Bantul, Pajangan , Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMU M-DANA ALOKASI UMUM	Mempertu Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Mempertu Pencegahan dan Pembantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyudupa n	Penguatan good-governanc e pada berbagai tingkatan Peman tapan Layanan Publi c Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kaparenewo n		15.000. 000,00	KAPANEWON PAJANGAN
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------------	---	--	---	--	------------------------	--	-------------------	-----------------------

									22 Laporan	5.000.0 00,00	Kab. Bantul, Pajangan , Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMU M-DANA ALOKASI UMUM	Mempertuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Mempertuat Pencegahan dan Pembantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemanfaatan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kaparenewo		5.000.0 00,00	KAPANEWON PAJANGAN
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	---	--	---	---	-------------------	--	------------------	-----------------------

									4 Dokum en	3.400.0 00,00	Kab. Bant ul, Paja ngan , Sem ua Kel/ Desa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	Memp erkuat Refor masi Politik, Hukum , dan Birokr asi, serta Memp erkuat Pence gahan dan Pembe rantas an Korups i, Narko ba, Judi dan Penyel udupa n	Peng uatan good- gover nanc e pada berb agai tingk atan Pema ntapa n Layan an P[ubli c Berb asis Tekn ologi Infor matik a	ASN Kapa newo n		3.360.0 00,00	KAPA NEW ON PAJA NGAN
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	---	--	---	---	--------------------------	--	------------------	-----------------------------------

	7	0	0	2.		Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	-			100 Persen	147.15 2.089,0 0			Memp erkuat Refor masi Politik, Hukum , dan Birokr asi, serta Memp erkuat Pence gahan dan Pembe rantas an Korups i, Narko ba, Judi dan Penyel udupa n	Peng uatan good- gover nanc e pada berb agai tingk atan Pema ntapa n Layan an P[ubli c Berb asis Tekn ologi Infor matik a	ASN Kapa newo n	-	302.44 0.000,0 0	
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi														
		1	1	0	0	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
				6	0															
				1	1															

									1 Dokum en	1.700.0 00,00	Kab. Bant ul, Paja ngan , Sem ua Kel/ Desa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	Memp erkuat Refor masi Politik, Hukum , dan Birokr asi, serta Memp erkuat Pence gahan dan Pembe rantas an Korups i, Narko ba, Judi dan Penyel udupa n	Peng uatan good- gover nanc e pada berb agai tingk atan Pema ntapa n Layan an P[ubli c Berb asis Tekn ologi Infor matik a	ASN Kapa newo n		2.550.0 00,00	KAPA NEW ON PAJA NGAN
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	---	--	---	---	--------------------------	--	------------------	-----------------------------------

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	37.200.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMU M-DANA ALOKASI UMUM	Mempertuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemerintahan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		57.000.000,00	KAPALAWAN PAJANGAN
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		1	1	8	0														
					3														

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	11.170.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMU M-DANA ALOKASI UMUM	Mempertuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemanfaatan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		70.000.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
		1	1	8	0														
					4														

									4	157.02	Kab.	DANA	Memp	Peng	ASN		153.00	KAPA
									Lapora	5.580,0	Bant	TRAN	erkuat	uatan	Kapa		0.000,0	NEW
									n	0	ul,	SFER	Refor	good-	newo		0	ON
											Paja	UMU	masi	gover	n			PAJA
											ngan	M-	Politik,	nanc				NGAN
											,	DANA	Hukum	e				
											Sem	ALOK	, dan	pada				
											ua	ASI	Birokr	berb				
											Kel/	UMU	asi,	agai				
											Desa	M	serta	tingk				
													Memp	atan				
													erkuat	Pema				
													Pence	ntapa				
													gahan	n				
													dan	Layan				
													Pembe	an				
													rantas	P[ubli				
													an	c				
													Korups	Berb				
													i,	asis				
													Narko	Tekn				
													ba,	ologi				
													Judi	Infor				
													dan	matik				
													Penyel	a				
													udupa					
													n					

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi			3 Unit	5.782.865,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sem ua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMU M-DANA ALOKASI UMU M	Memp erkuat Refor masi Politik, Hukum, dan Birokr asi, serta Memp erkuat Pence gahan dan Pembe rantas an Korupsi, Narko ba, Judi dan Penyel udupa n	Peng uatan good-gover nanc e pada berb agai tingk atan Pema ntapa n Layan an P[ubli c Berbas is Tekn ologi Infor matik a	ASN Kapa newo n		150.000.000,00	KAPA NEW ON PAJA NGAN
4	7	0	0				PROGRA M PENYELE NGGARA AN PEMERIN	Cakupan Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-								-	255.500.000,00	

					TAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
	7	0	0	2.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	-			91 Persen	16.450.000,00			Mempertuakan Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertuakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemanfaatan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Kapal baru dan Kalurahan	-	175.500.000,00
	7	0	0	2.	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												

						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	9.970.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMU M-DANA ALOKASI UMUM	Mempertuak Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertuak Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemanfaatan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		80.000.000,00	KAPALAWAN PAJANGAN
5	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat	-		91 %	110.762.500,00						-	281.211.000,00	

					DESA DAN KELURAH AN															
	7	0	0	2.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	-			91 Persen	83.360. 000,00			Memp erkuat Refor masi Politik, Hukum , dan Birokr asi, serta Memp erkuat Pence gahan dan Pembe rantas an Korups i, Narko ba, Judi dan Penyel udupa n	Peng uatan good- gover nanc e pada berb agai tingk atan Pema ntapa n Layan an P[ubli c Berb asis Tekn ologi Infor matik a	Masy araka t, Kalur ahan , dan Kapa newo n	-	183.71 1.000,0 0		
	7	0	0	2.	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														0
	1	1	3	0	0															0

									20 Lapora n	63.360. 000,00	Kab. Bant ul, Paja ngan , Sem ua Kel/ Desa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	Memp erkuat Refor masi Politik, Hukum , dan Birokr asi, serta Memp erkuat Pence gahan dan Pembe rantas an Korups i, Narko ba, Judi dan Penyel udupa n	Peng uatan good- gover nanc e pada berb agai tingk atan Pema ntapa n Layan an P[ubli c Berb asis Tekn ologi Infor matik a	Masy araka t, Kalur ahan , dan Kapa newo n		98.500. 000,00	KAPA NEW ON PAJA NGAN
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---	--	---	---	--	--	-------------------	-----------------------------------

									3 Laporan	27.402. 500,00	Kab. Bantul, Pajangan , Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMU M-DANA ALOKASI UMUM	Mempertu Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Mempertu Pencegahan dan Pembertan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan	Penguatan good-governanc e pada berbagai tingkatan Peman tapan Layanan Publi c Berbas is Teknologi Informatika	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon		97.500. 000,00	KAPANEWON PAJANGAN
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------------	---	--	---	--	--	--	-------------------	-----------------------

6	7	0	0			PROGRA M KOORDI NASI KETENTR AMAN DAN KETERTIB AN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	-			91 %	168.53 1.000,0 0					-	194.00 0.000,0 0		
	7	0	0	2.		Koordina si Upaya Penyelen ggaraan Ketenter aman dan Ketertiba n Umum	Capaian kinerja penyelengga ran ketentraman dan ketertiban umum	-			91 Persen	168.53 1.000,0 0			Memp erkuat Refor masi Politik, Hukum , dan Birokr asi, serta Memp erkuat Pence gahan dan Pembe rantas an Korups i, Narko ba, Judi	Peng uatan good- gover nanc e pada berb agai tingk atan Pema ntapa n Layan an Publi c Berb asis Tekn ologi Infor	Masy araka t, Kalur ahan , dan Kapa newo n	-	194.00 0.000,0 0	

														ba, Judi dan Penyel udupa n	ologi Infor matik a				
7	7	0	0			PROGRA M PENYELE NGGARA AN URUSAN PEMERIN TAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	-			100 Persen	5.825.0 00,00					-	200.00 0.000,0 0	
	7	0	0	2.		Penyelen ggaraan Urusan Pemerint ahan Umum Sesuai Penugas an Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggara an pemerintahan umum	-			91 Persen	5.825.0 00,00		Memp erkuat Refor masi Politik, Hukum , dan Birokr asi, serta Memp erkuat Pence gahan dan	Peng uatan good- gover nanc e pada berb agai tingk atan Pema ntapa n Layan	Masy araka t, Kalur ahan , dan Kapa newo n	-	200.00 0.000,0 0	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU KAPANEWON PAJANGAN



ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos,MM

Pembina Tk.I - IV/b

NIP. 197101101990031002